

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi menjadi salah satu perwujudan dari demokrasi negara, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2010). Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah selaku pihak yang turut berperan dalam menjalankan roda perekonomian negara, hendaknya mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien.

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian global. Hubungan ekonomi antar negara menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masing-masing. Ekspor merupakan sumber devisa ditambah perluasan pasar bagi produksi barang domestik dan perluasan tenaga kerja. Dalam teori Thomas Munn (Tokoh ekonomi klasik) menyatakan perdagangan internasional akan menguntungkan neraca pembayaran asalkan mencapai kondisi $X > M$ (Ekspor lebih besar daripada Impor).

Net ekspor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan domestik bruto (PDB). Net ekspor adalah total ekspor dikurangi total impor. Net ekspor merangsang meningkatnya pendapatan dan merangsang pertumbuhan ekonomi apabila jumlah ekspor lebih besar dari pada jumlah impor, sebaliknya apabila jumlah ekspor lebih kecil dari impor maka, net ekspor akan menurunkan pendapatan nasional (Purwanggono, 2015). Dengan

demikian, setiap provinsi hendaknya berupaya meningkatkan jumlah net ekspor agar pendapatan daerahnya juga ikut meningkat

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah memerlukan dukungan dari sektor investasi atau penanaman modal. Kegiatan investasi akan terus menambah stok modal (capital stock), yang mana akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Astuti, 2018). Pada umumnya, investasi atau penanaman modal yang dilakukan pemerintah daerah terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN maupun PMA adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi.

PMDN merupakan kegiatan menanam modal di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Indonesia. PMDN diharapkan mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Jufrida, 2016). Sedangkan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) dibutuhkan sebagai pendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja (Sukirno, 2004)

Pengelolaan keuangan daerah juga tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD harus dikelola dengan efektif dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Deviani, 2016). Efektivitas anggaran belanja adalah salah satu acuan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

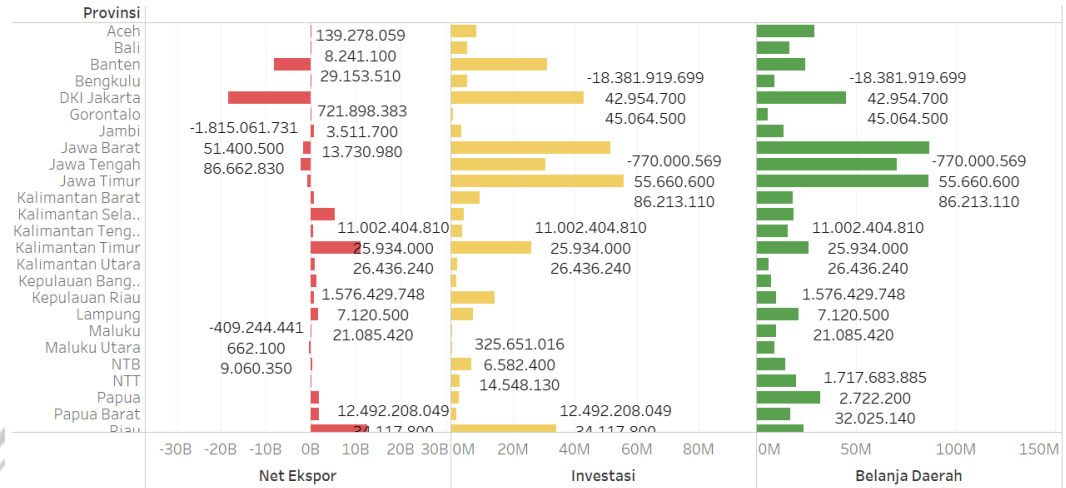
Penggunaan anggaran dapat dinilai efektif apabila anggaran dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (Bunna, 2021). Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. (Kawatu, 2019). Oleh sebab itu analisis terhadap belanja daerah perlu dilakukan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Analisis belanja dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran belanja, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya.

Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904569 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Berdasarkan perolehan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan sumbangan pertumbuhan terbesar yaitu lebih dari 50%.

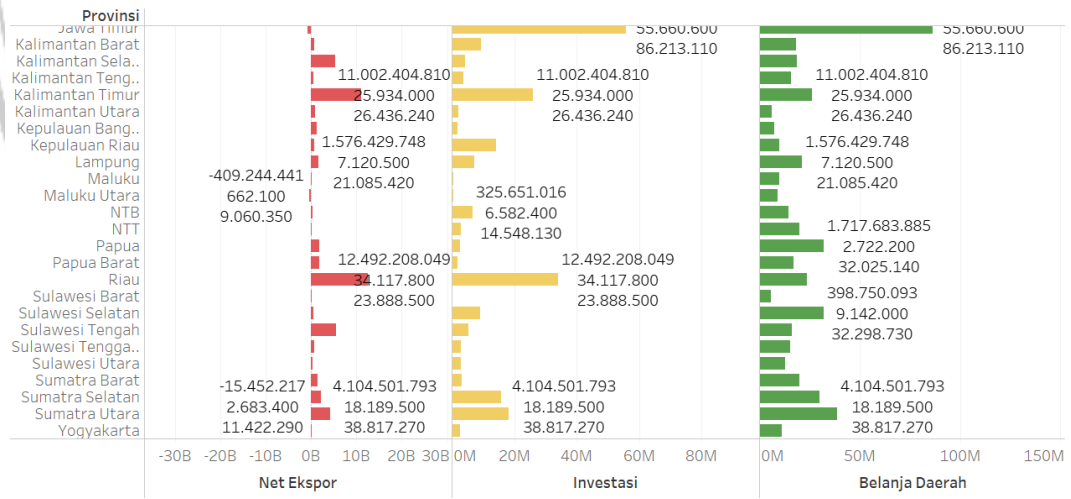
Gambar 1.1.

Data Net Ekspor, Investasi dan Belanja Daerah pada 34 Provinsi Tahun 2020

<Data Net Ekpor, Investasi dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2020>



<Data Net Ekpor, Investasi dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2020>



Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Rata-rata PDRB tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 2.448 miliar rupiah, PDRB tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar 2.815 rupiah sedangkan rata-rata PDRB terendah yaitu terdapat pada Provinsi Maluku Utara sebesar 34,4 miliar rupiah. Untuk net ekspor, nilai tertinggi terdapat pada Provinsi Riau pada tahun 2017 sebesar 14.731.901.842 miliar rupiah sedangkan

terendahnya terdapat pada provinsi DKI tahun 2018 sebesar 39.434.883.443 miliar rupiah. Investasi di Indonesia pada tahun 2015-2020 juga berfluktuasi. Rata-rata investasi tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Barat sebesar 39.664 juta rupiah, Investasi tertinggi berada pada tahun 2020 sebesar 51.400,5 juta rupiah sedangkan terendahnya berada pada tahun 2015 sebesar 26.272,9 juta rupiah. Untuk belanja daerah, provinsi dengan belanja tidak langsung tertinggi adalah Jawa Barat pada tahun 2020 dengan nilai Rp 31.121.593.545.000 dan terendah adalah Maluku Utara pada tahun 2018 dengan nilai Rp122.581.349.000 Sementara belanja tidak langsung tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 dengan nilai Rp 35.373.952.08.000 dan terendah adalah provinsi Gorontalo tahun 2020 dengan nilai Rp 713.991.000.000.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai net ekspor, investasi dan efektivitas belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan. Pertama, dari jurnal penelitian yang ditulis oleh (Agasisti et al., 2020) yang berjudul *Public Finance, Government Spending and Economic Growth: The Case of Local Governments in Italy* (Keuangan Publik, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Pemerintah Daerah di Italia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang cukup kuat antara pengeluaran pemerintah daerah saat ini dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lainnya dari (Bojanic, 2013) yang berjudul *The Composition of Government Expenditures and Economic Growth in Bolivia* (Komposisi Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Bolivia). Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pertahanan, pengeluaran desentralisasi (lokal atau regional) dan pengeluaran merupakan cara terbaik bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan negara. Dengan demikian, belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun penelitian dalam negeri, seperti yang dilakukan oleh Pangestin, dkk (2021) yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Net Ekspor dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi dan net ekspor secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Purwanggono, dkk (2015) meneliti dengan judul “Pengaruh Ekspor Neto, Tenaga Kerja dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa ekspor neto dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun fenomena atau permasalahan yang ditemukan adalah masih adanya ketimpangan pada nilai net ekspor, jumlah investasi maupun pertumbuhan ekonomi pada berbagai daerah atau provinsi di Indonesia. Sementara itu, dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat adanya perbedaan hasil penelitian. Perbedaan tersebut dikarenakan karena adanya perbedaan pada sampel, periode ataupun metode analisis yang digunakan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh net ekspor, investasi dan efektivitas belanja pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tiga puluh empat Provinsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah, diantaranya:

- 1) Bagaimana pengaruh net ekspor, total investasi dan efektivitas belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang dibahas yaitu menganalisis bagaimana pengaruh net ekspor, investasi dan efektivitas belanja Pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 2) Objek penelitian adalah 34 Provinsi di Indonesia.
- 3) Periode penelitian yaitu selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2020.
- 4) Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- 5) Total investasi bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- 6) Variabel belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh net ekspor, investasi dan efektifitas belanja daerah pemerintah daerah di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Ilmiah

Kegunaan penelitian ini pada aspek akademis adalah sebagai sarana belajar dalam mengaplikasikan berbagai teori-teori yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan referensi untuk menyempurnakan dan mendalami kajian penelitian.

- 2) Manfaat Praktis

Pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif dan berguna bagi Pemerintah Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.